

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Untuk menjawab peran santri dalam kemenangan PPP tentu dibutuhkan beberapa kerangka yang utuh baik itu pemilu, demokrasi, santri dan partai politik itu sendiri. Maka perlu melihat kembali kajian-kajian terdahulu.

1. Konsep Partisipasi Politik

Dalam suatu Negara yang menganut system demokrasi, partisipasi politik merupakan suatu hal yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan politik suatu Negara. Sahid mengemukakan gagasannya bahwa partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama¹. Artinya suatu Negara bisa disebut sebagai demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga Negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak maka kadar kedemokratisan Negara tersebut masih diragukan.

Berdasarkan gagasan tersebut jelas bahwa partisipasi politik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan politik pada suatu Negara yang menganut system demokrasi. Partisipasi politik bukan hanya sekedar memberikan hak suara untuk memilih pemimpin mereka, tetapi lebih dari itu bahwa partisipasi politik warga Negara yang aktif juga menunjukkan bahwa suatu Negara tersebut telah layak disebut sebagai Negara demokrasi.

- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan tetapi bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetensi dan keefektifan politik dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai

¹ Komarudin Sahid.2011.*Memahami Sosiologi Politik*.(Bogor: Ghalia Indonesia), Hal. 175

sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetap terpisah dari tindakan politik.

- b. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah Negara preman (*Privat Citizen*) atau lebih tepatnya, orang per orang dalam partisipasinya sebagai warga Negara biasa, bukan orang-orang professional dibidang politik, seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon politikus, lobby professional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai Sembilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (*evocational*) dan bersifat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-peranan sosial lainnya.
- c. Kegiatan dari apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.² Sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, mengubah atau mempertahankan organisasi system politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu, aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru hara, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah., terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi adalah karena keinginan dan digerakkan orang lain.

² Hariyanto, 2017, *Elit Massa dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PolGov), Hal. 114-115

2. *Ashabiyah*

Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.

Menurut Muhammad Mahmud Rabie', *ashabiyah* merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam partisipasi sosial, *ashabiyah* dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. *Kedua*, keberadaan *ashabiyah* dapat mempersatukan berbagai *ashabiyah* yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.

Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa *ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi *ashabiyah*, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.³

Ibnu Khaldun menempatkan istilah *ashabiyah* menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial ini terbentuk atau terdapat pada kelompok masyarakat generasi pertama, yang ikut berjuang mendirikan sebuah negara, dinasti, maupun kerajaan. Namun ketika memasuki kelompok generasi berikutnya semangat solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*) dan memenuhi kewajiban kepada

³ Nurul Huda. *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah*. SUHUF, Vol. 20, No. 1, Mei 2008: 41 - 52

sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Mengenai alasan diperlukannya *ashabiyah* tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis penting. *Pertama*, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat. Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya.⁴

Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan.

Kemudian dalam pembentukan *ashabiyah* tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000

⁴ Nurul Huda. *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah*. SUHUF, Vol. 20, No. 1, Mei 2008: 41 - 52

orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.

3. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Demokrasi di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupakan bentuk awal dari demokrasi modern. Seperti demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern baru dirumuskan setelah Zaman Pencerahan (abad ke-17 dan 18), ketika para filsuf mendefinisikan elemen penting demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil dasar atau hak asasi manusia, kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara.

Konsep demokrasi, meskipun dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai pada zaman Yunani, telah mengalami pertumbuhan secara signifikan pada masa kebangunan kembali Eropa menuju abad pencerahan. Pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dengan rakyat, atau negara dan masyarakat menurut konsep kontemporer. Pemikiran-pemikiran yang berkembang telah memberikan kontribusi berharga bagi upaya untuk mendefinisikan kembali dan juga aktualisasi istilah dan konsep demokrasi.⁵

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*".

⁵ Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Hal 50-51

4. Pemilu

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sejak reformasi tahun 1998 yang berimplikasi pada terjadinya amandemen UUD 1945 dan dilakukannya pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, kehidupan demokrasi hukum dan politik di Indonesia semakin berkembang. Pemilihan umum menjadi pusat perhatian bagi partai politik dan elit-elit disemua elemen bangsa bahkan termasuk warga Negara pada umumnya. Reformasi konstitusi tidak saja memandatkan kepada rakyat untuk menentukan anggota lembaga perwakilan di legislatif tetapi juga memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada warga Negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.⁶ Pemilihan umum yang didesain secara konstitusional dalam UUD 1945 khususnya pada perubahan ketiga, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan teknis Pemilihan Umum ditetapkan melalui Undang-Undang yang putusan oleh DPR dan Presiden. Pemilihan umum yang telah dilaksanakan menyisakan banyak permasalahan terutama karena cita-cita untuk hidup dalam Negara hukum yang

⁶ Tohir Bawazir, 2015, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), Hal 84-85

demokratis dipandang belum dapat diwujudkan secara jelas.⁷

5. Santri

Istilah santri memiliki riwayat yang panjang. Pertama-tama, khalayak umum biasa menggunakan istilah putihan. Istilah ini, digunakan seorang misionaris untuk merujuk pada kelompok Islam saleh. Ricklefs menjelaskan dengan gamblang, dalam artikelnya *Polarization in Javanese Society*, bahwa misionaris yang mendeskripsikan penggunaan tersebut ialah Carel Poensen. Poensen, menurut Ricklefs, adalah seorang misionaris Belanda yang dikirim ke wilayah Kediri. Dalam lawatannya ke Kediri, Poensen menuliskan identitas keagamaan di Jawa terbagi menjadi dua, putihan dan abangan. Dua istilah tersebut untuk mendefinisikan kelompok yang taat beragama dan sebaliknya. Ricklefs, dengan percaya diri menjelaskan proses-proses terbelahnya identitas keagamaan di Jawa. Dalam bukunya yang lain, *Mengislamkan Jawa*, Ricklefs melihat bahwa proses terbelahnya identitas tersebut disebabkan banyak hal. Sebelum identitas kejawaan tersebut terbelah, Ricklefs meyakini adanya sintesis-mistik di Jawa. Dalam sintesis-mistik, terjadi peleburan norma-norma Islam dengan ajara-ajaran mistik kejawaan. Ricklefs menyimpulkan bahwa identitas tersebut perlahan-lahan memudar setelah terjadi perang Jawa yang dahsyat. Setelah kejadian tersebut, institusi pendidikan Islam kita sebut pesantren tumbuh subur. Antusiasme beragama Islam pun terjadi di Jawa. Banyak orang Jawa berduyun-duyun untuk belajar Islam secara hakiki. Mulailah, model Islam lawas digalakkan yang secara konseptual disebut Ricklefs sebagai sintesis-mistik.⁸ Mencoloknya antusiasme tersebut ialah saat berbagai organisasi berasaskan Islam berkembang di Jawa. Organisasi seperti Muhammadiyah, Syarikat Dagang

⁷ Wahyu Widodo. *Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Tinjau dari Perpektif Politik dan Hukum*. *Jurnal Meta Yuridis*. Vol 1. No.1.2018. Hal. 5-6.

⁸ Dhurorudin Mashad, 2021, *Politik Kaum Santri dan Abangan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) Hal. 56-57.

Islam, Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam mewarnai ekspresi beragama Islam di Jawa. Menurut Deliar Noer, kemunculan organisasi Islam tersebut adalah bentuk reaksi kelompok Islam atas gerakan politik atas nama agama. Hal tersebut mendorong santri untuk masuk dalam gerakan politik praktis dengan mengusung ideologi agama. Karena, ideologi agama khususnya Islam sangat beragam, maka para santri juga cenderung mengikuti tokoh yang diamininya. Sehingga, polarisasi santri yang terjadi dikalangan santri sangat kentara dalam narasi politik praksis ini.

Pesantren, kerap diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Dalam komunitas pesantren ada santri, ada kiai, ada tradisi pengajian serta tradisi lainnya, ada pula bangunan yang dijadikan para santri untuk melaksanakan semua kegiatan selama 24 jam. Saat tidur pun para santri menghabiskan waktunya di asrama pesantren. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dikarenakan pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi terbaca “en” (pesantren), yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama di mana para santri bertempat. Tempat itu dalam bahasa Jawa dikatakan pondok atau pemondokan. Adapun kata santri sendiri berasal dari kata cantrik, yang berarti murid dari seorang resi yang juga biasanya menetap dalam satu tempat yang dinamakan dengan padepokan. Pesantren mempunyai persamaan dengan padepokan dalam beberapa hal, yakni adanya murid (cantrik dan santri), adanya guru (kiai dan resi), adanya bangunan (pesantren dan padepokan), dan terakhir adanya kegiatan belajar mengajar. Meski bisa dikatakan pesantren ada unsur keidentikan dengan padepokan, tetapi tidak lantas benar kalau dikatakan pesantren adalah hasil adopsi dari padepokan. Sistem dan metodologi pembelajaran dalam pesantren lebih banyak kemiripan corak dengan “*Ashabu Shuffah*” di Madinah. Kalau diumpamakan hadist, justru terhadap golongan inilah

pesantren bersanad.⁹ Selain identik, kalau mau mengurutkan sejarah pesantren, maka akan ditemukan adanya persambungan sanada antara pesantren dengan *ashab al suffah*. Golongan yang masyhur¹⁰.

6. Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata politis yang berarti warga negara, politike teckne' berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau idiologi. Orang pertama yang memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles melalui pengamatannya tentang “ manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam arti luas setiap orang adalah politisi. Dalam hal ini Aristoteles berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalu interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif-negara. Karena itu semua orang adalah politisi, meski sebagian (penjabat negara) lebih banyak melakukan kegiatan politik bila dibandingkan dengan yang lainnya. Secara umum dapat

⁹ Dhurorudin Mashad, 2021, *Politik Kaum Santri dan Abangan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) Hal. 115-116

¹⁰ Ahmad Muhakamurrohman. *Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi*. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol 12. No 02. 2014. Hal 6-7.

dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam *an Introduction to Politics* ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan.¹¹

*Ayat yang Terkait:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

Artinya: *Dan Allâh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di*

¹¹ Kahfi Ananda Giatama, Ibnu Sodiq. *Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai Politik. Journal of Indonesian History*. Vol. 4. No. 1. 2015. Hal. 5-6.

muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa [An-Nûr/24:55].

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: *Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” [Al-Baqarah/2:30].*

Fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Politik

Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi terhadap kesadaran akan hak-hak warga Negara (hak-hak rakyat), penyampaian informasi yang benar, ikut mendidik masyarakat dalam memelihara hak-hak politiknya. Sosialisasi politik bersifat membangun, memelihara bahkan bisa saja mengubah budaya politik masyarakat yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup tiap warga Negara.

b. Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik adalah menjadi titik keseimbangan bagi iklim perpolitikan nasional, yaitu terjadinya proses yang berimbang antara masuknya arus aspirasi dari bawah dan penyaluran informasi dari atas.

c. Pembentukan Kader Politik

Seseorang sebelum menjadi kader bangsa yang akan menduduki posisi-posisi penting dipemerintahan, memegang jabatan politik baik di legislatif (wakil rakyat) maupun eksekutif (pemerintahan), ia perlu menghadapi seleksi dan teruji terlebih dahulu di kehidupan partai politik tempat awal mula penggodokan kader, tempat berlatih politik, tempat belajar soal-soal kenegaraan, tempat berpraktek

menjadi pemimpin, tempat menguji diri untuk memahami aspirasi masyarakat dan lain-lain.¹²

d. Pengendali Konflik Masyarakat

Didalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur, tidak sedikit melahirkan konflik dan semua beradu untuk mendapatkan kemenangan. Disamping mudah terpicu konflik horizontal diantara masyarakat sendiri, juga tidak sedikit melahirkan konflik vertical, yaitu oenentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian ini, partai politik harus tampil sebagai penengah dan menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa dan menginformasikan kehendak politik penguasa kepada masyarakat. Dalam hal konflik terjadi ditengah masyarakat, partai politik hendaknya mampu menyelesaikan konflik melai penyelesaian politis, yaitu antar partai politik yang mewakili suara komunitas masing-masing di DPR/DPRD.¹³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

¹² Kahfi Ananda Giatama, Ibnu Sodiq. *Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai Politik*. *Journal of Indonesian History*. Vol. 4. No. 1. 2015. Hal. 5-6.

¹³ Hendrarto, *Peran dan Fungsi Partai Poitik dalam Mencetak Kader Pemimpin (Mekanisme dan Tanggung Jawab Pemimpin)*, Vol. 26, No. 2, 15 September 2006 (Tahun ke 13) Hal. 311-314.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Kolom Penelitian	Metode	Tesis	Hasil
1.	Politik Familisme di Tubuh Partai Islam Lokal (Laila Khotid Alfridaus, Jihan Marsya Azahra, Marsya Azahra, 2019)	Tulisan ini mendiskusikan politik familisme di partai Islam lokal dengan melacak konteks terbentuknya, struktur familisme di partai serta implikasi politiknya	Kualitatif deskriptif	Politik familisme, implikasi kebijakan partai, kiai, santri, budaya politik	Penelitian yang dilakukan oleh Laila Khotid Alfridaus dan Jihan Marsya Azahra bertujuan untuk mengkaji tentang politik familisme dan partai Islam di Indonesia yang menghasilkan pandangan pola politik familisme di partai Islam seperti PPP, PKB dan PAN.
2.	Pesantren : Santri, Kiai dan Tradisi (Ahmad Muhakarrohman, 2014)	<i>Pertama</i> pondok pesantren dalam sejarahnya telah melahirkan banyak kiai besar yang cukup berpengaruh dalam tatanan sosial di Indonesia., <i>Kedua</i> , pondok pesantren yang telah menjadi bagian dari tradisi telah menumbuh-kembangkan wahana intelektual melalui sederet mekanisme pendidikan kepada para santri. Hal ini dilakukan dengan pengajaran Al-Qur'an, hadis, maupun kitab. <i>Ketiga</i> , dalam arus perkembangan, pola pendidikan di pesantren telah berkembang dari tradisional menjadi modern. Hanya saja, masih ada pondok pesantren yang masih bertahan	Kualitatif deskriptif	Optimalisasi, fungsi, tradisi, pesantren dan santri	Penelitian yang dilakukan Ahmad Muhakarrohman ini bertujuan untuk mengulik kehidupan pesantren, santri, kiai dan tradisi dengan menghasilkan olah pikir baru dari segi pesantren dengan kultur dan sejarah yang didalamnya terdapat tradisi dan masyarakat seperti santri.

2014)	Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari) (Zaini Tamim AR, 2015)	Pendidikan pesantren dan politik dalam pandangan KH.M. Hasyim Asy'ari	Kualitatif deskriptif	Pesantren, kepemimpinan, KH.M. Hasyim Asy'ari	Penelitian ini dilakukan oleh Zaini Tamim AR bertujuan untuk menciptakan manusia yang tak hanya mempunyai integritas keilmuan yang memadai tapi juga integritas moral dan etika yang akan menjadi modal utama ketika seorang santri kembali ke tengah masyarakat.
7.	Genealogi Peran Kaum Santri dalam Sketsa Politik Nasional (Zaini Tamim AR, 2017)	Lingkup pembahasan tulisan adalah relasi esantren dan kepemimpinan dan peran kaum santri terhadap dunia politik nasional	Kualitatif deskriptif	Santri, pesantren, politik nasional	Penelitian ini dilakukan oleh Zaini Tamim AR bertujuan untuk mengetahui peran dan kontrobusi santri untuk NKRI dari masa ke masa.
8.	Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama (Wasisto Raharjo Jati, 2012)	Ulama dan pesantren dalam dinamika politik dan kultur NU	Kualitatif deskriptif	Nahdlatul Ulama, pesantren, ulama, <i>divergence of politics</i> (perbedaan politik)	Penelitian ini dilakukan oleh Wasisto Raharjo Jati dengan tujuan menyikapi terjadinya politisasi ulama dan pesantren yang kemudian berimplikasi pada semakin terfragmentasi kalangan nahdliyyin di aras lokal.
9.	Santri dan Politik (Studi Peran Putra Kiai di Jawa Timur) (Nilna Rahmayanti, 2020)	Bagaimana latar belakang putra kiai mengikuti politik, bagaimana strategi pemenangan politik putra kiai dan bagaimana peran politik putra kiai terhadap pondok pesantren	Kualitatif deskriptif	Politik, santri, peran, gus, elite Agama	Penelitian ini dilakukan oleh Nilna Rahmayanti yang bertujuan untuk mengetahui kemenangan putra kiai dalam dunia politik karena ingin meningkatkan pemberdayaan pondok pesantren dan santri, politik digunakan untuk menjaga agama dan keutuhan negara.
10.					

Fokus penelitian kami menasar kepada peran sentral santri dalam upaya menggiring masa untuk kemenangan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara. Selain itu fokus kami juga kepada hubungan atau relasi antara santri yang berasal dari pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang terhadap elit-elit politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir didefinisikan oleh Sugiyono sebagai model konseptual tentang bagaimana hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka Gambar 2.1, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

